

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arifin, Zainal, 2012, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Beirne, Piers, James Messerschmidt, 1995, *Criminology*, second edition, Harcourt Brage College Publishers.
- Danil, Elwi, 2014, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dermawan, Mohammad Kemal, Mohammad Irvan Oli'i, 2015, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. 2006. *Saksi Sosok yang Terlupakan dari Sistem Peradilan Pidana*. ELSAM. Jakarta.
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gunakaya, Widiada, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Hadjon, M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Harahap, M. Yahya, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O. S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O. S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2017, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Kartono, Kartini, 1998, *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung.
- Krisnawati, Dani, *et al*, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta Selatan.
- Marbun, Rocky, 2009, *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty. Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Alumni. Bandung.
- Mustofa, Muhammad, 2007, *Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, FISIP UI Press, Depok.
- Pribadi, Slamet, Amalia Syauket. 2022. *Pemberatan Pemidanaan terhadap Para Big Fish Corruption*. Kreasi Cendekia Pustaka. Jakarta.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Sukrisno, Subur, 2017, *Sejarah Korupsi di Indonesia*, IPB Press, Bogor.
- Suriasumantri, Jujur S., 1986, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*, Gramedia, Jakarta.

### **Jurnal**

- Ariyanti, Dwi Oktafia, Nita Ariyani, “Model Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 2, Mei 2020.
- Bou, Antonius Yoseph, I Nyoman Sujana, I Ketut Sukadana, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Analogi Hukum*, No. 2, Vol.2, 2020.
- Binaji, Sigit Herman, Hartanti, “Korupsi sebagai Extra Ordinary Crimes”, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Dinanti, Dinda, Yuliana Yuli Wahyuningsih, “Perlindungan Hukum atas Hak-Hak Tersangka pada Proses Penyidikan Perkara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 3, No. 2, 2016.
- Habibi, Muhammad, “Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi”, *CEPALO*, Vol. 4, No. 1, Januari- Juni 2020.
- Harahap, Kurniawan, “Implementasi Hak-Hak *Justice Collaborator* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Lata*, Vol. 3, No. 2, 2021.

- Ifrani, “Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa”, *Al’ Adl’*, Vol. IX, No. 3, Desember 2017.
- Julianto, Bambang, “Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Renaissance*, Vol. 5, No. 1, Januari 2020.
- Kawengian, Tiovary A., “Peranan Keterangan Saksi sebagai Salah Satu Alat Bukti dalam Proses Pidana Menurut KUHAP”, *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 4, April 2016.
- Kusumawardhani, Wini, Subekti, “Upaya Perlindungan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jkt.Pst)” *Recidive*, Vol. 8. No. 2, Mei – Agustus 2019.
- Mamahit, Coby Elisabeth, “Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), *Lex Crimen*, Vol. V, No. 6, Agustus 2016.
- Marbun, Roy Ganda, et. all, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime”, *Jurnal Ilmiah Simantek*, Vol. 4, No. 3, Agustus 2020.
- Muhammad, Rusli, “Pengaturan dan Urgensi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Ius Quia Iustum* Vol. 2, No. 22, April 2015
- Nursyamsudin, Samud, Sistem Peradilan Pidana Terpadu, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vo. 7, No. 1, Juni 2022.
- Prasetyo, Dwi, Ratna Herawati, “Tinjauan Sistem Peradilan Pidana dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tersangka di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 3, 2022.
- Rosifany, Ony, “Kekuatan Alat Bukti Petunjuk dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Dedikasi*, Vol. 35, No. 2, 2016.
- Rozi, Fachrul, “Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana”, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018.
- Semendawai, Abdul Haris, “Penetapan Status *Justice Collaborator* bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Padjajaran*, Vol. 3, No. 3, 2016.

Sirait, Adi Syahputra, “Kedudukan dan Efektivitas *Justice Collaborator* di dalam Hukum Acara Pidana”, *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2019.

Suisno, “Peranan Keterangan Saksi sebagai Salah Satu Alat Bukti dalam Proses Pidana”, *Jurnal Independent*, Vol. 4, No. 1, 2016.

Soeskandi, Hari, Setia Sekarwati, “Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 11, November, 2021.

Sosiawan, Ulang Mangun, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication)” *De Jure*, Vol. 19, No. 4, Desember 2019.

Trimarlina, Komang Dara, I Nyoman Sujana, Ida Ayu Putu Widiati, “Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan dalam Proses Penyidikan”, *Jurnal Analogi Hukum*, No. 1, Vol. 3, 2019.

Wahyuningrum, Kartika S., Hari S. Disemadi, Nyoman S. Putra Jaya, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, April 2020.

### **Hasil Penelitian/ Tugas Akhir**

Artantojati, Sigit, 2012, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Wardhana, Dharma, 2017, *Fair Trial dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Zulhendra, Sarli, 2015, *Pandangan LPSK Mengenai Perlindungan Bagi Saksi Berdasarkan Perannya Sebagai Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Islam Indonesia, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Zidni, Irfan, 2022, *Kepastian Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

### **Internet**

ANTARA, “KPK Ajukan Banding terhadap Putusan Abdul Khoir”, <https://www.antaranews.com/berita/567201/kpk-ajukan-banding-terhadap-putusan-abdul-khoir>, diakses pada 24 Januari 2023.

CNN Indonesia, “MA Cabut Aturan Ketat Remisi Koruptor di PP No. 99 Tahun 2012”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211029144046-12-714103/ma-cabut-aturan-ketat-remisi-koruptor-di-pp-no-99-tahun-2012>, diakses pada 4 Mei 2023.

Databooks, “Indonesia Negara Terkorup ke-5 di Asia Tenggara”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/indonesia-negara-terkorup-ke-5-di-asia-tenggara-pada-2022>, diakses pada 14 April 2023.

Detiknews, “Kejagung: Pemberlakuan KUHP Baru Masih 3 Tahun, Perlu Sosialisasi di Internal”, <https://news.detik.com/berita/d-6450219/kejagung-pemberlakuan-kuhp-baru-masih-3-tahun-perlu-sosialisasi-di-internal>, diakses 18 Juni 2023.

HukumOnline.com, “Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti dalam Hukum Pidana”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti-dalam-hukum-pidana-lt62b06e0ab0e92/>, diakses pada 24 Januari 2023.

HukumOnline.com, “Perbedaan Saksi Mahkota dengan *Justice Collaborator*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-saksi-mahkota-dengan-justice-collaborator-i-lt58d33e6281239>, diakses pada 29 April 2023.

Kompas.com, “Sejarah Justice Collaborator, ketika Penegak Hukum Amerika Berada dalam Kendali Bos Mafia Al Capone”, <https://www.kompas.tv/article/316939/sejarah-justice-collaborator-ketika-penegak-hukum-amerika-berada-dalam-kendali-bos-mafia-al-capone?page=all>, diakses pada 21 Oktober 2022.

Kompas.com, “Tiga Modus Korupsi Paling Marak Menurut Data ICW Semester I 2022”, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/12/09/183055282/tiga-modus-korupsi-paling-marak-menurut-data-icw-semester-i-2022?page=all>, diakses pada 22 Januari 2023.

Kompas.com, “Sejarah dan Isi Deklarasi Universal HAM”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/01/03000011/sejarah-dan-isi-deklarasi-universal-ham->, diakses pada 21 Februari 2023.

Kompas.com, “Damayanti Wisnu Putranti Dituntut 6 Tahun Penjara”, <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/29/17392381/damayanti.wisnu.putranti.dituntut.6.tahun.penjara?page=all>, diakses pada 12 Mei 2023.

Kompas.com, “LPSK Sebut Tak Ada Nota Kesepahaman dengan KPK Sejak 2015”, <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/28/16333981/lpsk-sebut-tak-ada-nota-kesepahaman-dengan-kpk-sejak-2015>, diakses pada 11 Mei 2023.

KBBI Daring, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diakses pada 12 Desember 2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi, “Profil KPK”, <https://web.kpk.go.id/id>, diakses 19 Desember 2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi, “Sekilas KPK”, <https://web.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>, diakses 19 Desember 2022.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, “Subjek Perlindungan”, <https://lpsk.go.id/home/subjek>, diakses pada 20 Oktober 2022.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, “Kasus Prioritas”, <https://lpsk.go.id/home/prioritas>, diakses pada 20 Oktober 2022.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, “LPSK dan KPK Sepakat Kerjasama Perlindungan Saksi Tipikor”, <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/2804>, diakses pada 11 Mei 2023.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, “Program Perlindungan”, <https://lpsk.go.id/home/perlindungan>, diakses pada 11 Mei 2023.

Media Indonesia, “Ombudsman Temukan Praktik Jual-Beli *Justice Collaborator*”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/138469/ombudsman-temukan-praktik-jual-beli-justice-collaborator>, diakses pada 26 Mei 2023.

PUBLICPEOPLE.ORG, Who is Joseph Valachi?, <https://www.publicpeople.org/who-is-joseph-valachi.htm>, diakses pada 20 Oktober 2022.

Pusat Edukasi Antikorupsi, “Modus Korupsi yang Paling Populer di Indonesia”, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220606-modus-korupsi-yang-paling-populer-di-indonesia>, diakses pada 22 Januari 2023.

Pusat Edukasi Antikorupsi, “Mengenal Tiga Jenis Korupsi Berdasarkan Skala dan Paparannya”, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230111-mengenal-tiga-jenis-korupsi-berdasarkan-skala-dan-paparannya>, diakses pada 8 Mei 2023.

Suara.com, “Berujung Debat, Beda Pendapat Kejagung vs LPSK Soal Status *Justice Collaborator* Bharada E”, <https://www.suara.com/news/2023/01/20/165907/berujung-debat-beda-pendapat-kejagung-vs-lpsk-soal-status-justice-collaborator-bharada-e>, diakses pada 26 Mei 2023.

Sindonews.com, “Pengaduan Melonjak tapi Jumlah Pegawai LPSK Baru Terpenuhi 7,2 Persen”, <https://nasional.sindonews.com/read/894555/15/pengaduan->

*melonjak-tapi-jumlah-pegawai-lpsk-baru-terpenuhi-72-persen-1664068167*, diakses pada 13 Juli 2023.

Tempo. co, “E-KTP, KPK Kabulkan Irman dan Sugiharto Jadi Justice Collaborator”, <https://nasional.tempo.co/read/886771/e-ktp-kpk-kabulkan-irman-dan-sugiharto-jadi-justice-collaborator>, diakses pada 9 Desember 2022.

Tempo.co, “Pembongkar Kasus Rasuah BI, Agus Condro Meninggal Dunia”, <https://nasional.tempo.co/read/1216959/pembongkar-kasus-rasuah-bi-agus-condro-meninggal-dunia>, diakses pada 9 Desember 2022.

Tempo.co, “Kejaksaan jadi Instansi Pemberi Status Justice Collaborator Kasus Korupsi Terbanyak”, <https://data.tempo.co/data/1282/kejaksaan-jadi-instansi-pemberi-status-justice-collaborator-kasus-korupsi-terbanyak>, diakses pada 24 Januari 2023.

### **Peraturan Perundang-undangan**

*International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966 (ICCPR, 1966).

*United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, 2003 (UNODC, 2003)

*Witness Protection Act* 1984.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 117).

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 606)

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI, KPK dan LPSK, Nomor M.HH-11.MH.03.02.TH.2011, Nomor PER 045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2015/PNJKT.PST perihal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Amir Fauzi.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt. Pst. perihal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi perkara Abdul Khoir, 9 Juni 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt. Pst. perihal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi perkara Dessy Ariyati Edwin, 7 September 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/PID.SUS-TPK/2017/PN Jkt. Pst perihal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi perkara Andi Agustinus alias Andi Narogong, 21 Desember 2017.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI perihal Banding perkara Andi Agustinus alias Andi Narogong, 3 April 2018.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI perihal Banding perkara Andi Agustinus alias Andi Narogong, 3 April 2018.

## **Laporan**

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2021, Laporan Tahunan 2021: Dedikasi Melindungi Korban Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan, Jakarta

## **Hasil Penelitian Lapangan**

Data Rekap Pengajuan *Justice Collaborator* yang Ditolak dan Diterima Komisi Pemberantasan Korupsi.

Data Rekap Keputusan *Justice Collaborator* Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK 2022 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Hasil wawancara dengan Lalola Easter Kaban, Peneliti Indonesia Corruption Watch, 17 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan Iftitah Sari, Peneliti Institute for Criminal Justice Reform, 17 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan Fakhrur Haqiqi, Koordinator Bidang Humas dan Protokol Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 28 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan Syahrial Martanto Wiryawan, Tenaga Ahli Biro Penelaahan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 31 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan Rianto Wicaksono, Tenaga Ahli Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, 5 April 2023.

Hasil wawancara dengan Togi Robson Sirait, Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, 14 April 2023.